



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 53 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020**





WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 53

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2,769,739,000	3,046,982,840		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Umbulharjo			Rapat Koordinasi yang terselenggara	72 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	147,600,000	162,630,000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Laporan perjalanan dinas	30 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Alat Tulis Kantor yang tersedia	66 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,622,139,000	2,884,352,840	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 Jenis						
							Surat Dinas yang dikelola	3 jenis						
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	10 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	17 Jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	21 Jenis						
							Jasa pembayaran telepon	12 bulan						
							Bahan percontohan	2 jenis						
							Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Jasa pemeriksaan laboratorium	4 jenis						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	52 kali						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	56 unit						
							Jasa percetakan	16 jenis						
							Jasa penggandaan	449.170 lembar						
							Jasa penjiilidan	100 buku						
							Pakaian Dinas dan atributnya terpenuhi	691 stel						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	10 jenis						
							Jasa pemeliharaan taman	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor dan gudang	2 unit						
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer	13 unit						
							Sarana / Peralatan kerja yang tersedia	3 jenis						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran :							
							a. Pol PP	71 orang (14 bulan)						
							b. Koordinator lapangan Pol PP (polisi)	1 orang (12 bulan)						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					926,104,000	1,018,713,685		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	138,000,000	151,800,000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :		Dukungan terhadap peningkatan	100%	788,104,000	866,913,685	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas/Operasional									sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				
							a. Roda dua	36 unit						
							b. Roda empat	27 unit						
							c. Roda enam	3 unit						
							d. Sepeda ontel	7 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					10,316,000	11,347,600		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Umbulharjo			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 jenis dokumen		Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	10,316,000	11,347,600	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
										Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD				
4	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	95%					6,143,035,000	6,757,338,455		
4.1	Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi			Kota Yogyakarta			Perda yang ditegakkan secara yustisi	900 kejadian		Penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi	362,145,000	398,359,500	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Tindak pidana ringan yang disidangkan	700 kasus						
							Kasus Berita Acara Singkat/Biasa yang disidik	4 kasus						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Hukum yang ditegakkan terhadap saksi / tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS	40 kasus						
4.2	Operasi Ketertiban Umum			Kota Yogyakarta			Hukum Terpadu yang ditindak	72 operasi penindakan	Penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara non yustisi	100%	5,780,890,000	6,358,978,955	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Operasi Penertiban Gabungan	80 operasi						
							Kawasan Tertib yang dikendalikan	5 kawasan						
							Keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus yang dikendalikan	2 kawasan						
5	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	88%					3,844,731,000	4,229,203,223		
5.1	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus			Kota Yogyakarta			Kegiatan Pemkot yang dilakukan pengamanan	150 pengamanan	Kondisi yang aman bagi pejabat, kegiatan pemkot, terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	3,737,201,000	4,110,920,223	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Tempat penting milik Pemkot yang dilakukan pengamanan	3 obyek vital						
							Komplek Balaikota yang dilakukan pengamanan	12 bulan						
5.2	Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat			Kota Yogyakarta			Operasional petugas intel Pol PP	12 bulan	Terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	107,530,000	118,283,000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Patroli Bina Pelajar	32 kali						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Patroli Bina Kamling	14 kecamatan						
							Monitoring dan penyelidikan	12 kali						
6	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	86%					480,788,000	528,866,793		
6.1	Pemantapan Kapasitas Pol.PP			Kota Yogyakarta			Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP	35 kali	Kesiapsiagaan PPNS dan Pol.PP meningkat	100 orang	300,848,000	330,932,793	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Tes kesamaptaan	4 kali	Respon time PPNS dan Pol. PP dalam penanganan pelanggaran Perda meningkat	100 orang				
							Bimbingan mental bagi Satpol PP	2 kali						
							Peraturan perundang-undangan yang dipahami (Peraturan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perparkiran, pondokan, reklame, dan bangunan gedung)	8 dokumen						
							Bimbingan Teknis Satpol PP	8 orang						
							Workshop Sat Pol.PP	2 kali						
							Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah	1 kali						
							Profil Sat Pol PP	100 buku						
6.2	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan			Kota Yogyakarta			Penegakan produk hukum yang dikaji (Perda PKL, Perda Reklame, Perda Bangunan Gedung, Perda Menara Telekomunikasi, Perda TDUP)	5 produk hukum	Hasil kajian, resume, dan kodifikasi peraturan perundang-undangan serta naskah kerjasama tersedia	85 peraturan perundang-undangan	179,940,000	197,934,000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Rancangan produk hukum yang dikaji (6 Perwal Pelaksana Perda No.15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Raperwal terkait pondokan, Raperwal SOP Satpol PP, Raperwal Pantib for School, Raperwal	10 rancangan produk hukum						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Perparkiran)								
							Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar	4 kali konsultasi							
							Resume dan kodifikasi produk hukum daerah	8 resume							
							Hasil naskah kerjasama yang tersusun ((Naskah Kerjasama dengan Paksikaton, FKAAU, GRAS, Merkade, Laskar Jogja, Lakodya, FKPPi, FJR)	7 naskah kerjasama							
							Seminar Satpol PP tingkat DIY	1 kali							
7	Program Perlindungan Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	76,47%					2,802,046,000	3,082,249,221			
7.1	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas			Kota Yogyakarta			Pembekalan Sat Linmas	6 kali	Kapasitas kinerja dan keterampilan petugas linmas dalam penanganan masalah sosial, bencana dan SAR Linmas Kota Yogyakarta meningkat	100%	1,148,653,000	1,263,517,740	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta	
							Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas	6 kali	Gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta yang terkendali	100%					
							Petugas Linmas yang diberi pelatihan dasar	50 orang							
							Pengamanan wilayah oleh petugas linmas	365 kali							
							Piket rescue linmas	365 kali							
							Sarasehan Satlinmas	1 kali							
7.2	Pembinaan Masyarakat dan			Kota Yogyakarta			Pendampingan Duta Ketertiban	100 kampung	Dukungan, peran serta	170 kampung	1,653,393,000	1,818,731,481	Lanjutan	Satpol PP Kota	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Gerakan Kampung Panca Tertib									dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta				Yogyakarta
							Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung	100 kali						
							Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib	121 kali						
							Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib	20 kampung						
							Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib	6 kali						
							Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib	500 kali						
							Pembinaan masyarakat	24 kali						
							Pelaksanaan Si Pantib Award 2020	1 kali						
Total											16,976,759,000	18,674,701,817		